

NASIONALISME DALAM PANDANGAN ETNIK MINORITAS DI YOGYAKARTA
(STUDI KASUS ANGGOTA PERHIMPUNAN INDONESIA-TIONGHOA/INTI
YOGYAKARTA)

Oleh; Muryanti, M.A¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga

There are Tionghoa ethnics in Indonesia are showed pluralism and multicultural phenomena. They are minority between pluralism ethnics. In 1961, more than 2,45 million Tionghoa ethnics or 2,5 percent from total population Indonesia in this time (Coppel, 1983). In other hand, Tionghoa ethnics have reins more than 70-80 percent economy sectors.

As imigrant nation, there is integration indigen and Tionghoa is need a long time because culture, social and self interest of nation are different. Hasya Bactiar say, that difficulty integration process is not they don't need, but there is push away from several interest. Whereas, solidarity can improved if they come have unity from the others. The disagreement, is not separation from many policy to them from Colonialism until New Orde is double. In cultural and politic sector, they have limited. In the other hand, they have previledge in economy sector.

The policy inclened sensitif and acomodatif to them is pasca reformasi, with UU Kewarganegaraan and legitimacy to cultur Tionghoa Ethnics, like Barngsai and Imlek. The legitimacy from government is very important and have influence with nasionalism.

Tionghoa ethnics nasionalism is different from indigen. We have different about color line and cultural, so the nasionalism form is different too. The possession of Indonesia in foreign with variants activity is part of their nationalism.

Indonesian society is very plural, so not uniform in many things, like nasionalism action. Because of that, there is no problem we have many variant nasionalism. Not only in package but also in action.

Keywords; Tionghoa, Nasionalism and Indonesia

¹ Penulis adalah pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga. Kontak; newsyant@yahoo.com atau 085643845415

INDONESIAKU, INDONESIA KITA

Ada yang selalu harus kita camkan,
Kita ini satu bangsa,
Meski berbeda bahasa, adat dan keturunan,
Meski berbeda warna kulit, agama dan keyakinan

Ada yang harus terus kita ingat,
Kita ini satu tanah air,
Meski tinggal di daerah berbeda,
Meski terpisah selat dan lautan

Ada yang wajib kita hayati,
Kita ini satu negara,
Yang berdasarkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Empat Lima,
Bhineka Tunggal Ika,

Indonesia,
Itulah janji dan sumpah kita
Di hadapan Tuhan,
Di haribaan ayah bunda,
Di tekad dan jasad pahlawan kusuma bangsa
Di harkat, martabat dan kehormatan anak manusia...

Indonesia,
Merah putih bendera dan semangatnya,
Merah putih jiwa dan rohnya,
Merah putih nafas dan harapannya...

Indonesia,
Itulah komitmen diri,
Prasasti dan sumpah kita,
Dulu, sekarang dan selamanya...

Indonesia
Engkaulah hidup dan matiku!

(Budi S. Tanuwibowo, Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI)

PENDAHULUAN

Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia merupakan bagian dari fenomena etnisitas yang sampai saat ini masih menyisakan berbagai macam konflik sosial dari masa ke masa. Pada masa Kolonialisme Belanda, kondisi sosial masyarakat Nusantara, stratifikasi sosial-ekonomi secara formal mengikuti garis ras, budaya dan agama. Belanda menduduki posisi penguasa dalam bidang politik dan ekonomi, sehingga menjadi lapisan yang termakmur. Golongan Keturunan China, Timur Asing yang menjadi media perantara dalam proses penghisapan bumi dan bangsa pribumi, berada di tengah. Pada kerak stratifikasi sosial adalah golongan pribumi yang hampir secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai petani *peasant* Islam dengan produktivitas kerja yang rendah, kecuali sedikit kelompok aristokrat mereka.²

Dominasi dan peranan ekonomi Cina di Perantauan (Huakiau) seringkali dituduh sebagai akar penyebab berbagai ketegangan sosial-politik di negara-negara Asia Tenggara. Kehadiran dan perilaku kelompok etnik Cina dianggap sebagai sumber masalah serius yang tercermin dari berbagai karya.³ Hal tersebut menimbulkan sinophobia yang tampaknya dirangsang oleh prasangka etnis rasial yang meluas dan dipertajam oleh pemisahan struktural serta tendensi eksklusivitis. Cina perantauan, kelompok minoritas secara demografis, memenangkan kompetisi ekonomi atas bumiputera dan menggeser kelompok mayoritas (demografis dan politik) ke posisi minoritas dan pinggiran. Realitas ini menciptakan kondisi kondusif bagi sentimen dan permusuhan terhadap etnis Cina.

Pada dasarnya memang ada perbedaan dalam berbagai hal antara orang Cina dengan Bumiputra. Misalnya; bahasa, gaya hidup, adat istiadat, memperingati hari raya dan aktivitas sosial, juga mengenai cara berpikir, sistem nilai budaya, sikap dan penilaian mereka terhadap karya dan keuntungan, cara-cara yang ditempuh guna menarik keuntungan material serta mobilitas sosial. Berbagai perbedaan tadi erat kaitannya dengan latar belakang perbedaan kebudayaan. Sehingga sering menimbulkan prejudice (prasangka), apakah itu menyangkut intelegensia, kesehatan, kesucian atau moralitas. Dari perbedaan itu sangat sukar untuk mengatakan hal-hal apakah yang biasanya menyebabkan kurang harmonis hubungan antara moralitas dan minoritas.⁴

Secara umum dikatakan bahwa berdasarkan keturunan, di Indonesia terdapat dua klasifikasi atas orang Cina; yaitu peranakan dan totok. Klasifikasi ini terutama berdasarkan atas kelahiran seseorang dari sebuah perkawinan atau kelahiran generasi di atasnya. Orang Cina peranakan adalah mereka yang lahir dari suatu perkawinan yang salah satu atau kedua orang tuanya atau generasi di atasnya adalah bumiputra. Lazimnya, pola perkawinan yang terjadi adalah antara laki-laki Cina dengan perempuan Bumiputra. Sebaliknya orang Cina Totok menunjukkan pada seseorang yang dilahirkan dari suatu perkawinan sesama orang Cina. Maksudnya kedua orang tua mereka atau generasi di atasnya belum atau tidak pernah melakukan perkawinan campuran.

Berdasarkan hubungan mayoritas dan minoritas di Asia Tenggara, Wang Gung Wa mengklasifikasikan orang Cina menjadi 3 kelompok; (1). Jumlahnya besar, berorientasi pada RRC karena status kewarganegaraan dan aktivitas mereka yang ditentukan status tersebut yang disebut Cina chauvinistik. (2). Orang-orang Cina yang menerima dan melihat pentingnya ia loyal kepada negara tempat bermukim, namun kepentingan ekonomi kelompok

² W.F Wertheim, *Indonesia Society in Transition*, Bandung; Sumur Bandung, 1956 dalam Amri Marzali ; Kesenjangan Sosial Ekonomi antar golongan Etnik (kasus China-Pribumi di Indonesia) Majalah PRISMA, no.12 tahun 1994

³ Victor Purcell, *The Chinese in Southeast Asia* (London;Oxford University Press, 1951) dalam Konflik dan Perlawanan; Kongsi Cina di Kalimantan Barat. 1770-1854; Harlem Siahaan dalam Majalah PRISMA, no.12 tahun 1994

⁴ Gungwiu Wang, *A Short History of The Nanyang Chinese* (Singapore; Eastern University, 1959) hlm 268

ini masih berlandung pada identitas mereka sebagai orang Cina. (3) Dia mengidentifikasi diri kepada negara tempat bermukim. Mereka memiliki kecenderungan untuk berpihak kepada bumiputra dan menyiapkan diri untuk mengarungi kehidupan dan kematiannya di negeri yang disebut sebagai negeri sendiri. (4) Orang-orang Cina yang secara menyeluruh terasimilasi ke dalam masyarakat bumiputra.⁵

Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Cina di Indonesia terbagi menjadi tiga orientasi; (1) kaum Cina nasionalis yang diwakili oleh kelompok Sin Po, (2) Mereka yang berkooperasi dengan penjajah Belanda yang diwakili kelompok Chung Hua Hui dan (3) Mereka yang bekerjasama dengan kaum nasionalis Indonesia dan anti Kolonialis, Jepang dan Belanda, yang diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia. Setelah kemerdekaan, jika dipandang dari segi asimilasi dan akulturasi, masyarakat Cina digolongkan menjadi; (1) golongan yang berorientasi pada RRC/Taiwan. Pada umumnya mereka adalah generasi tua dan mengalami pendidikan Sekolah Cina di masa penjajahan atau setelah kemerdekaan. (2) Golongan yang berorientasi pada Belanda/ Barat, (3) golongan yang berorientasi pada Indonesia.

Sejumlah penulis berpendapat sangat sukar untuk mengklasifikasikan seseorang di Indonesia sebagai orang Cina, sebaliknya ada peneliti lain, Wilmot (1960;15) tidak ada kearaguan untuk mengidentifikasi seseorang di Indonesia sebagai orang Cina. Sekalipun sebagian besar laki-laki Cina telah kawin dengan perempuan bumiputra, terutama banyak terjadi sebelum Perang Dunia II (PD II). Anak-anak hasil perkawinan campuran itu hampir semuanya menjadi Cina. Banyak diantara keturunan campuran itu terasimilasi dan terakulturasi ia dalam keluarga Cina dan mempunyai nama Cina. Sulitnya membuat klasifikasi orang Cina di Indonesia adalah banyak orang tua atau generasi diatas mereka yang melakukan perkawinan campuran dan tidak lagi menulis serta berbahasa Cina. Mereka juga telah melepaskan kebiasaan melakukan pemujaan terhadap nenek moyang. Karena itu kriteria yang paling tepat untuk mendefinisikan seseorang, apakah ia termasuk orang Cina atau bukan, adalah identifikasi diri atau identifikasi sosial. Dengan demikian, klasifikasi itu bukan didasarkan atas status kewarganegaraan, latar belakang budaya, hukum ataupun ras.

Banyak orang Cina di Indonesia yang tidak mau disebut sebagai orang Cina. Mereka lebih mengidentifikasi dirinya seagai peranakan, yang berarti dilahirkan di daerah setempat, tetapi bukan penduduk asli, atau dilahirkan di daerah setempat dari darah Cina orang asing. Pada dasarnya mereka adalah orang Cina yang berbahasa Indonesia. Istilah peranakan yang digunakan selama ini juga kurang tepat, misalnya dipakai untuk menyebut orang Cina yang lahir di Indonesia tanpa memandang latar belakang kebudayaannya. Seorang Cina kelahiran Indonesia, tidak otomatis tergolong peranakan. Jika mereka tidak menguasai bahasa Cina, kemudian mereka sehari-hari di rumah hanya menggunakan bahasa Indonesia, maka mereka dapat disebut sebagai peranakan. Sebaliknya, meskipun mereka lahir di Indonesia, tetapi dalam kehidupan sehari-hari di rumah menggunakan bahasa Cina, mereka termasuk klasifikasi Totok. Artinya orang asing yang lahir di negara lain dan berdarah asing.⁶

Menurut Suryadinata, meskipun orang Cina telah memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), berbagai simbol identifikasi nasional Indonesia masih sukar diserap dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kuatnya pengaruh kebudayaan dari negeri leluhur mereka dalam membentuk identitas diri mereka sebagai orang Cina.⁷ Kuatnya orientasi dan identifikasi diri orang Cina terhadap negeri leluhur, menyebabkan kurangnya *sense of belonging* dan loyalitas mereka terhadap negara Indonesia. Dengan demikian, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya menimbulkan *sense of belonging*, loyalitas dan solidaritas tersebut dalam kehidupan nyata. Salah satu upaya untuk

⁵ Wang, Gung Wa, *A Short History of The Nanyang Chinese* (Singapore; Eastern University, 1959)

⁶ Skinner, G.William, *Report on The Chinese in Southeast Asia* (New York; South East Asia Program Department of Far Eastern Studies, 1950)

⁷ Hari Poerwanto, *Orang Cina Khek dari Singkawang* (Jakarta; Komunitas Bambu, 2005), hlm 1

menumbuhkannya adalah dengan melakukan asimilasi⁸, yang di kalangan orang Cina merupakan konsekuensi yang mendasar dan logis dari pemberian status WNI bagi orang Cina, sekaligus dimaksud untuk mempermudah proses asimilasi dengan seluruh rakyat Indonesia. Apakah asimilasi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai etnis Tionghoa memiliki rasa nasionalisme dan meleburkan diri dengan bangsa Indonesia? Tulisan ini mengkaji tentang kiprah organisasi INTI yang secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai spirit nasionalisme Keindonesiaan.

PERHIMPUNAN INDONESIA TIONGHOA (INTI)

Perhimpunan INTI merupakan salah satu organisasi masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia. Organisasi ini bersifat kebangsaan sesuai dengan mukadimah UUD 1945, bebas, egaliter, pluralis, inklusif, demokratis, tidak bernaung atau mengikat diri kepada salah satu partai politik dan terbuka bagi semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang setuju pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta tujuan Perhimpunan INTI.

Pendiri organisasi INTI terdiri dari 17 orang yang muncul dari berbagai kalangan; ada yang Peranakan, Totok, Kristen, Katholik, Buddha, Konghucu, Dao, pengusaha, intelektual, pengamat sosial dan politik dan sebagainya. Mereka sepakat bahwa “masalah Tionghoa” yang merupakan peninggalan Belanda dan rezim Orde Baru harus diselesaikan sampai tuntas, walaupun akan memakan waktu satu, dua bahkan tiga generasi. Menurut mereka untuk mewujudkan visi dan tujuan tersebut etnis Tionghoa harus mengintegrasikan diri secara total ke dalam mainstream atau arus besar bangsa Indonesia tanpa harus menanggalkan seluruh identitas keTionghoannya, karena etnis Tionghoa merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Etnis Tionghoa harus secara aktif bergandengan tangan dengan seluruh komponen bangsa lainnya untuk bersama-sama membangun Indonesia yang demokratis dan bersih dari segala bentuk diskriminasi, kemiskinan, korupsi, kebodohan dan ketidakadilan. Bangsa dan negara Indonesia harus menjadi bangsa dan negara yang berdaulat penuh, berpegang teguh pada hukum, sejahtera dan berperadaban tinggi sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia yang semakin mengglobal. Hanya di dalam masyarakat itulah diskriminasi dalam segala bentuknya bisa benar-benar bersih dari bumi Indonesia dan “permasalahan” Tionghoa lenyap untuk selama-lamanya.⁹

Visi organisasi ini adalah menjadi organisasi yang maju, modern, bercitra Internasional, berorientasi pada Kebangsaan Indonesia, menghargai hak asasi manusia, egaliter, pluralis, inklusif, demokratis dan transparan. Dengan misinya berperan aktif dalam dinamika proses pembangunan bangsa, antara lain penuntasan masalah Tionghoa di Indonesia, menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang kokoh, rukun bersatu dalam keharmonisan, bhinneka, saling menghargai dan saling percaya. Fokus perjuangan INTI terbagi menjadi 4 bidang; 1). Bidang Politik dan Hukum; perhimpunan INTI menentang segala bentuk diskriminasi terhadap setiap warga negara Indonesia, apapun latar belakang identitasnya, baik ras, etnis, gender, agama, keyakinan maupun kedudukan sosialnya. Perhimpunan ini memperjuangkan penyebaran paham Nasionalisme Modern, bukan paham Etno Nasionalisme yang sempit dan tidak sesuai dengan kenyataan sejarah bangsa Indonesia. Dalam bidang ekonomi, perhimpunan ini mendukung penerapan *affirmative action* terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah, tanpa membeda-bedakan ras, etnis, gender, agama, keyakinan, maupun kedudukan sosialnya, sebagai kebijakan kondisional dan temporal, menuju terhapusnya kemiskinan dan peningkatan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia. Dalam bidang kebudayaan, memperjuangkan penyebaran doktrin *Cross*

⁸ Asimilasi adalah proses dan hasil pertemuan dua kebudayaan atau lebih. Ada kalanya istilah asimilasi dan akulturasi dipakai dalam pengertian yang sama dan tidak jarang tumpang tindih

⁹ Buku Kenangan; Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia-Tionghoa; Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan, 1999-2009 (Jakarta; Perhimpunan INTI, 2009), hlm. 67

Cultural Fertilization atau penyerbukan silang antara budaya sebagai wujud penghargaan terhadap **pluralisme dan multikulturalisme**. Dalam bidang sosial, mendorong terbentuknya yurisdiksi yang mengatur sistem perlindungan sosial, menuju terciptanya sebuah negara kesejahteraan. Perhimpunan ini mendorong terwujudnya pemerataan pendidikan tepat guna yang bercirikan pengembangan nalar dan kreativitas, etika, moral serta memperoleh keterampilan yang diperlukan (*marketable skill*).¹⁰

Sifat perhimpunan ini adalah kebangsaan sesuai dengan mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, bebas, egaliter, pluralis, inklusif, demokratis, tidak bernaung dan mengikatkan diri kepada salah satu partai politik dan terbuka bagi semua Warga Negara Indonesia yang setuju kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan. Dengan maksud dan tujuan di bidang sosial, kultural dan idiil. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilakukan adalah di bidang sosial; mendirikan lembaga formal dan non formal, mendirikan panti asuhan, panti jompo dan panti wreda, mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium, mengadakan pembinaan olahraga, mengadakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan dan mengadakan studi banding; di bidang kultural, menyelenggarakan kegiatan kesenian antara lain; seni musik, seni tari, paduan suara dan lainnya dan bidang idiil; memberikan pendidikan hukum, ekonomi dan politik dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan.¹¹

Organisasi INTI merupakan kelompok yang ingin menyelesaikan masalah Tionghoa secara *holistic* dengan menghimpun sebanyak mungkin orang-orang Tionghoa ke dalam suatu wadah untuk bersama-sama komponen bangsa lainnya menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi bangsa Indonesia menuju Indonesia Baru yang adil, makmur dan berperadaban tinggi sehingga dapat bersaing di tengah globalisasi yang sedang melanda dunia.¹² Pendekatan secara holistik tersebut perlu dilakukan karena orang-orang Tionghoa kebanyakan masih bersifat *inward looking*. Sehingga sejak awal perhimpunan INTI menegaskan bahwa penyelesaian apa yang disebut dengan “masalah Tionghoa” hanya bisa diselesaikan melalui kerjasama antara masyarakat Tionghoa dengan berbagai komponen bangsa lainnya.

PENGERTIAN NASIONALISME

Nasionalisme dapat didefinisikan dengan berbagai macam cara. Pada awalnya, nasionalisme adalah gagasan mengenai kesatuan kebangsaan dalam suatu wilayah politik kenegaraan. Teori politik membagi manusia ke dalam berbagai bangsa dan nasionalisme sebagai nilai rohaniah yang mendorong kehendak untuk hidup sebagai satu kesatuan bangsa serta mempertahankan kelangsungan hidup kebangsaannya itu.¹³ Menurut David Miller, pengertian Nasionalisme;

A national identity requires that the people who share it should have something in common, a set of characteristics that in the past was often referred to as a “national character”, but which i prefer to describe as a common public culture. It is incompatible with nationality to think of the members of the nations as people who merely happen to have been thrown together. There must be a sense that the people belong together by virtue of the characteristics that they share. It is not so easy, however, to pin down precisely what this entails. Let me at that stage at least try to guard againts certain elementary errors. One is that

¹⁰ Ibid, hlm 85

¹¹ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan INTI, Jakarta, 2008

¹² Herdi Sahrasad, Struktur Kolonial, Etnis Tionghoa dan Kerusuhan Rasial (Jakarta; Jurnal Universitas Paramadina Vol.5, No.2, Juli 2007), hlm 201-202

¹³ Munir Mulkhan, Dialog Interaktif Nasionalisme, Agama dan Modernitas dalam Ariel Heryanto, Nasionalisme, Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan (Yogyakarta;Pustaka Pelajar, 1996)

*the shared characteristics must be based on biological descent, that our fellow Nationals must be our kith and kin, a view that leads directly to racism. If what matters to nationality is that people should share a common public culture, then this quite compatible with their belonging to a diversity of ethnic groups. Indeed, it is possible to regard ethnic mixing as the source of the nation's distinctive character. All that matter is that the melding together of different 'races' should have produced a people with a distinct and common character of this own. Equally, although every nation must have a homeland. It is by no means essential that every member should have been born there.*¹⁴

Istilah nasionalisme yang kita gunakan sekarang ini terkandung pengertian 1). Suatu proses pembentukan atau pertumbuhan bangsa-bangsa, yang mencakup serangkaian proses yang lebih khusus dan acapkali membentuk obyek nasionalisme dalam pengertian lain yang lebih sempit. 2). Suatu sentimen atau kesadaran memiliki bangsa yang bersangkutan, 3). Suatu bahasa dan simbolisme bangsa, 4). Suatu gerakan sosial dan politik demi bangsa yang bersangkutan, yang menekankan adanya pencelupan dalam budaya bangsa, yakni penemuan kembali sejarahnya, kebangkitan kembali bahasa daerah melalui disiplin-disiplin filologi dan leksikografi, penggalian sastranya dan pemulihan seni dan kerajinan. 5). Suatu doktrin dan/atau ideologi bangsa, baik yang umum ataupun khusus.¹⁵

Menurut Sartono Kartodirjo, konsep nasionalisme disini mencakup konsep kepribadian, semacam metafora tentang kolektivitas yang mempunyai karakter seperti seorang individu, yang berlaku juga untuk konsep identitas nasional. Mempersonifikasikan nasion cukup memudahkan semantik politik disamping pemakaian simbol-simbol atau imago-imago lain telah meresap dalam kultur politik modern. Dalam komunikasi politik, konsep-konsep tentang nasionalisme perlu diterjemahkan dengan metafor dan simbol sehingga imago konkret lebih mudah dapat dipopularisasikan. Tidak dapat diabaikan suatu kenyataan bahwa pada prinsip-prinsip nasionalisme melekatlah paham demokrasi, kualitas hidup (*liberty*) dan keadilan sosial.¹⁶

Nasionalisme lazimnya berawal sebagai ide atau konsep, kemudian para pengembannya berusaha merealisasikan lewat suatu gerakan baik secara evolusioner maupun revolusioner. Nasionalisme dalam konteks kolonial berfungsi sebagai *counterideology* dari kolonialisme. Jika kolonialisme bersifat konservatif, maka nasionalisme secara wajar bersifat antikolonial dan radikal-revolusioner. Sementara itu nasion menunjuk pada suatu komunitas sebagai kesatuan kehidupan bersama yang mencakup berbagai unsur yang berbeda dalam aspek, etnik, kelas atau golongan sosial, aliran kepercayaan, kebudayaan, linguistik dan sebagainya. Kesemuanya terintegrasikan dalam perkembangan historis sebagai kesatuan sistem politik berdasarkan solidaritas yang ditopang oleh kemauan politik bersama.¹⁷

Nasionalisme sendiri memuat hal-hal sebagai berikut 1). kesatuan (*unity*) yang mentransformasikan hal-hal morfik menjadi monomorfik sebagai produk proses integrasi. 2) kebebasan (*liberty*), khususnya bagi negara-negara jajahan yang memperjuangkan pembebasan dan kolonialisme. 3. kesamaan (*equality*) sebagai bagian implisit dari masyarakat demokratis yang merupakan antitesa dari masyarakat kolonial yang diskriminatif

¹⁴ David Miller, *On Nationality* (Great Britain; Oxford University Press, 1997) hlm 25

¹⁵ Anthony D. Smith, *Nasionalisme; Teori, Ideologi dan Sejarah* (Jakarta; Erlangga, 2001), hlm. 6-10

¹⁶ Sartono Kartodirjo, "Nationalisme, Lampau dan Kini" makalah dalam seminar tentang nasionalisme Nasionalisme Indonesia menjelang abad XXI yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma di Universitas Kristen Satya Wacana, 2-5 Juni 1993, Salatiga, 1993:4 dalam Dr. H. Roeslan Abdulgani, *Problem Nasionalisme, Regionalisme dan Keamanan di Asia Tenggara* (Salatiga; Universitas Duta Wacana, 1994) hlm. xviii

¹⁷ Ibid. Hlm xviii

dan otoriter.4) kepribadian yang lenyap sebagai negasi kaum kolonial dan 5) prestasi yang merupakan sumber inspirasi dan kebanggaan bagi warga negara nasion.¹⁸

Menurutnya, nasionalisme terbagi menjadi 4 bagian; 1) nasionalisme barat, yang pada abad ke XIX berkembang bersamaan dengan kapitalisme serta industrialisme yang pada dasarnya saling memperkuat sehingga menimbulkan ekspansionisme yang pada puncaknya menghadirkan kolonialisme dan imperialisme yang ada di dunia ini. 2). Nasionalisme ekonomi, muncul karena perebutan daerah jajahan untuk kepentingan industri serta untuk mempertahankan neraca perdagangan yang menguntungkan bagi negara induk dengan menentukan tarif tinggi bagi barang-barang impor. 3). Nasionalisme sosialisme, yang muncul pada tahun 1933 dalam bentuk nasionalisme nazi. 4). Nasionalisme religius dan 5). Nasionalisme etnis.¹⁹

Muatan nasionalisme resmi menurut Benedict Anderson adalah menatap masa silam sekaligus menghadap ke depan. Bedanya dengan nasionalisme-nasionalisme yang lain adalah antara dusta dan mitos. Segala macam merek terdaftar nasionalisme, dengan umbul-umbul seperti lagu kebangsaan, taman makam pahlawan, bendera nasional dan lainnya menjadikannya lekat dengan nasionalisme. Sebagaimana pernyataan Soekarno bahwa upaya untuk menyuburkan nasionalisme adalah dengan 1) menunjukan kepada rakyat bahwa hari dahulu adalah hari dulu yang indah. 2) kami menambah keinsyafan rakyat, bahwa ia punya hari sekarang, adalah hari sekarang yang gelap dan 3). Kami memperlihatkan kepada rakyat sirnanya hari kemudian yang berseri-seri dan terang cuaca, beserta cara-caranya mendatangkan hari kemudian yang penuh dengan janji-janji tersebut.²⁰

Definisi bangsa atau nasion menurutnya adalah komunitas politis yang dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang imajiner karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan tak kan kenal sebagian besar anggota yang lain, tidak akan bertatap muka dengan sebagian besar anggota yang lain, bahkan mungkin tidak pernah mendengar tentangnya. Pada akhirnya, bangsa dibayangkan sebagai sebuah komunitas, sebab tidak peduli akan ketidaksetaraan nyata dan eksploitasi yang mungkin lestari dalam tiap bangsa, dimana bangsa itu sendiri dipahami sebagai kesetiakawanan yang mendalam dan arahnya mendatar/horizontal.²¹

Konsep kebangsaan tidak bisa dipisahkan dengan konsep identitas nasional. Identitas nasional mendorong kita untuk melakukan aktivitas moral yang berkaitan dengan kebangsaan. Dengannya memberikan kepada kita sebuah kewajiban dan tanggungjawab. Sehingga melahirkan sebuah pernyataan bahwa ketika kita melakukan kegiatan moral tersebut, kita bisa dibedakan dengan bangsa yang lain.²²

Sementara itu Fukuyama menyatakan bahwa identitas nasional diupayakan untuk merusak ke dalam kehidupan pribadi dan kebudayaan, bukan dipolitisasi dan dijadikan dasar hak hukum.²³ Berkaitan dengan dinamika integrasi nasional dan dengan begitu perkembangan nasionalisme, di dalam suatu masyarakat bangsa yang bersifat majemuk sangat tergantung pada beberapa hal berikut secara horizontal, dinamika integrasi nasional suatu masyarakat majemuk sangat ditentukan 2 hal; (1) konfigurasi dasar struktur masyarakat yang bersangkutan berdasarkan sejumlah parameter nominal. (2) karakter hubungan antar berbagai parameter struktur sosial ini. Suatu masyarakat majemuk dengan kompetisi seimbang dan masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan memiliki kemampuan untuk

¹⁸ Ibid, hlm xvii

¹⁹ Ibid, hlm xix

²⁰ Benedict Anderson; Komunitas-Komunitas Imajiner; Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme (Yogyakarta; Pustaka Pelajar dan Insist Press, 1999), hlm xxii

²¹ Ibid, hlm 7-9

²² Ross Poole, *Nation and Identity* (London and New York; Routledge, 1999), hlm 74

²³ Larry Diamond, *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi* (Bandung; ITB, 1998)

mengembangkan dinamika integrasi nasional daripada suatu masyarakat dengan minoritas dominan atau masyarakat mejemuk yang tersegmentasi.²⁴

DINAMIKA PERHIMPUNAN INTI

Lantas bagaimana dengan nasionalisme masyarakat Tionghoa di Indonesia? Secara umum, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun orang Tionghoa sendiri untuk mengidentifikasi bahwa dirinya adalah bagian dari bangsa Indonesia. Untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan di Indonesia, banyak orang Cina yang mengganti nama diri dan nama perusahaannya dengan nama yang lazim ataupun tidak lazim di Indonesia. Dalam bidang keagamaan, mereka menganut agama Buddha karena agama tersebut yang paling dekat dengan Samkau (gabungan Konghucu, laucu dan Budha) dan menggantikan Klenteng dengan Vihara.²⁵

G.W. Skinner mengusulkan menggunakan identifikasi diri bagi anggota-anggota minoritas Tionghoa. Menurut kriteria itu, orang yang mempunyai nama keluarga Tionghoa tentu asal-usulnya Tionghoa.²⁶ Dia memperkirakan pada tahun 1961, ada 2,3 sampai 2,6 orang di Indonesia yang memenuhi syarat itu. Sejak tahun 1967 lebih sulit untuk mengidentifikasi warga negara asal Tionghoa secara tepat menurut nama keluarganya karena golongan asal Tionghoa itu telah mengindonesiakan nama mereka. Walaupun dengan adanya perubahan nama tersebut, Orang Indonesia asli masih dapat membedakan Tionghoa yang telah berganti nama dengan nama Indonesia dari penduduk asli sehingga mereka bisa dibedakan dalam konteks Indonesia.

Sebagaimana banyak di negara Asia Tenggara lainnya, masyarakat Tionghoa di Indonesia terkenal peranannya sebagai minoritas pedagang, yang pada akhirnya beberapa kasus yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut meluas pada permasalahan budaya, sosial dan politik. Salah satu segi pokok masalahnya berkaitan dengan identitas nasional, yang dihadapkan dengan adanya desakan kuat nasionalisme Indonesia. Dengan adanya isu tersebut, mereka menanggapi dengan cara berbeda-beda. Banyak yang masih ragu-ragu untuk mengidentifikasi diri dengan berbagai lambang nasional Indonesia. Beberapa mencoba mempertahankan identitas kesukuannya sambil tetap menjadi anggota dari bangsa Indonesia yang baru.²⁷

Dari hasil penelitian Hari Poerwanto dapat digunakan untuk mengukur derajat nasionalisme masyarakat Tionghoa di Indonesia. Menurutnya, para responden memiliki bentuk gambar, foto, lukisan dan patung yang berhubungan dengan kebudayaan, peristiwa, tokoh, alam sekitar yang ada di negara leluhurnya, misalnya bintang film mandarin, gambar pemandangan, lukisan tradisional Cina, gambar benda dan bangunan bersejarah di China yang diperoleh dari kalender atau iklan produk tertentu. Demikian halnya dengan foto dan gambar penyanyi Indonesia dan dari negara Ero-Amerika. Disamping itu gambar presiden dan wakil presiden serta lambang negara Bhineka Tunggal Ika, banyak terdapat di rumah responden. Termasuk penggunaan bahasa Indonesia yang hampir seimbang dengan bahasa China yang lain (Khek, Teochiu, Hokkian dan Hwa Yu).²⁸

Berkaitan dengan komunitas INTI, yang merupakan salah satu organisasi dengan jumlah yang besar, kegiatan yang dilakukan sangat banyak dan bervariasi. Kegiatan tersebut

²⁴ Nasikun, *Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk* dalam Ariel Heryanto, *Nasionalisme; Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996)

²⁵ Dr. Gondomono, *Membanting Tulang Menyembah Arwah; Kehidupan Kekotaan Masyarakat Cina* (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1996)

²⁶ G.Wiliam Skinner, *The Chinese Minority* dalam Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta Graffiti, 1984), hlm xvii

²⁷ *Ibid*, hlm. xx

²⁸ Hari Poerwanto, *Orang China Khek dari Singkawang*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hlm 166

dilakukan sebagai bagian dari visi dan misi organisasi tersebut dan secara langsung ataupun tidak langsung menunjukkan bagian dari bangkitnya rasa nasionalisme komunitas Tionghoa. Melalui hubungan baik dengan jajaran pemerintahan, perhimpunan ini berpartisipasi dengan berbagai macam kegiatan terkait dengan kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum, diantaranya dengan mendukung Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan pengkajian Hubungan antara keterlibatan warga negara keturunan Tionghoa sebagai PNS dengan hak sipil dan politik dan pemenuhan HAM dalam pengurusan Paspor bagi WNI keturunan Tionghoa, selain juga dengar pendapat dengan pansus RUU penghapusan diskriminasi dan Pansus RUU Kewarganegaraan DPR RI. Selain itu, dalam kegiatan Hukum, Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia mereka mensosialisasikan eksistensi Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia) menyusun, menerbitkan dan meluncurkan buku *Setengah Abad Jimly Asshiddiqie; Konstitusi dan Semangat Kebangsaan* serta mensosialisasikan UU Kewarganegaraan 2006 melalui seminar, diskusi, pencetakan booklet dan mendistribusikan *softcopy* UU tersebut ke berbagai milis di dunia maya. Upaya yang dilakukan tersebut merupakan usaha untuk proses penyusunan dan sosialisasi peraturan perundangan, penegakan hukum dan kampanye hak azasi manusia dan hak-hak sipil warga negara. Selain itu kiprah di bidang hukum, juga mendirikan klinik konsultasi hukum dengan cakupan layanan adalah menyediakan layanan konsultasi hukum cuma-cuma bagi masyarakat, yang tidak terbatas pada anggota perhimpunan INTI semata tetapi untuk masyarakat yang lebih luas.

Sebagai sebuah yayasan yang bersifat etnis, perhimpunan INTI membuka diri, menjalin silaturahmi dan kerjasama dengan berbagai macam kelompok pada skala Nasional ataupun Internasional. Pada level nasional, INTI bekerjasama dengan berbagai macam organisasi, diantaranya; Organisasi Tionghoa; Yayasan Nusantara Sejahtera, Perguruan Setia Bakti dan lainnya, LSM; The Wahid Institute, Yayasan Air Putih, Jaringan Islam Liberal dan lainnya, Pusat Penelitian; CSIS, Soegeng Soerjadi Institute, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan lainnya, Lembaga Negara; Sekretaris Negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan lainnya, Organisasi Keagamaan; PB NU, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Walubi dan lainnya, TNI/POLRI. Pada level Internasional mereka bekerjasama dengan Kedutaan Asing, Organisasi Internasian dan Bisnis.²⁹

Sebagai kelompok masyarakat dengan jaringan ekonomi dan bisnis, INTI memandang kebangkitan ekonomi Indonesia erat kaitannya dengan kestabilan dan kesejahteraan bangsa. Untuk itu, organisasi ini aktif dalam bidang bisnis dan ekonomi melalui berbagai kegiatan dan pembentukan Komite Perdagangan dan Industri. Pada tahun 2000, kerjasama dan MoU dengan *The Associated Chinese Chamber of Commerce and Industry of Malaysia (ACCCIM)* yang dilanjutkan dengan pertemuan dengan perwakilan dagang Taiwan. INTI juga dapat mengkoordinasikan 75 orang pengusaha Indonesia untuk menghadiri *World Chinese Entrepreneurs Convention* di Nanjing, China dalam rangka membina persahabatan dan pengenalan bisnis. Kegiatan lain yang dilakukan adalah menyelenggarakan seminar bertajuk bisnis dan ekonomi, seperti *Bedah Buku Filosofi Kuno dan Manajemen Modern* karya Mochtar Riyadi (2007), seminar UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (2007), seminar Family Business (2008), *Financial Tsunami; Global Changes vs Our Choices-The American Crisis Impact* (2008), Bisnis dan Korupsi (2008), *Economic Outlook 2009 dan Growing and Staying Up*. Pada tahun 2007, INTI membentuk komite perdagangan dan industri (*Commerce and Industrial Council-CIC*) serta *Young Entrepreneur Council (YEC)*,

²⁹ Buku Kenangan; Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia-Tionghoa; Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan, 1999-2009 (Jakarta; Perhimpunan INTI, 2009), hlm. 115

dimana secara langsung CIC menyelenggarakan Konvensi Bisnis Internasional Tionghoa Sedunia bersama dengan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa (PERPIT) dan *World Eminence Chinese Business Association* (WECBA).³⁰

Menyikapi berbagai macam bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia, INTI juga melakukan penyaluran bantuan bagi korban bencana Maluku (Juni 2000), berpartisipasi dalam misi kemanusiaan penyaluran bantuan bagi korban bencana gempa dan tsunami di Aceh, Medan, Nias (2004/5), pengiriman tim relawan dan medis dalam rangka misi kemanusiaan pasca gempa bumi di Yogyakarta (2006), bekerjasama dengan PERMATA (Persatuan Masyarakat Indonesia Tionghoa Peduli Bencana) menyalurkan bantuan kepada korban banjir bandang di Sinjai, Sulawesi Selatan (2006), bekerjasama dengan PERMATA, Majelis Agama Khonghucu Indonesia Banjar, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pangandaran, Kopassus dan Pergerakan Indonesia menyalurkan bantuan bagi korban Tsunami di Pangandaran, Jawa Barat (2006) dan sebagai tindak lanjutnya mengadakan *fund raising* untuk pengadaan tenda sekolah di Yogyakarta dan Sinjai. Terjun langsung dalam membantu korban bencana banjir yang melanda Jakarta (2007), korban kebakaran Suku Baduy-Banten (2007), bantuan medis bagi korban gempa di Padang (2007) dan bantuan sandang-pangan bagi korban longsor Manggarai, Nusa Tenggara Barat (2007). Terlibat aktif juga dalam penanganan bencana alam gempa bumi di Bengkulu dan Kepulauan Mentawai (2007).

Selain misi kemanusiaan tanggap bencana, sejak tahun 2000, Perhimpunan ini mengadakan aksi sosial rutin seperti layanan medis, pemeriksaan gigi, khitanan massal, pemeriksaan mata dan pembagian kaca mata baca, melakukan sejumlah operasi gratis untuk kasus-kasus berat pada masyarakat pra sejarah, melakukan program perbaikan sekolah dan bantuan alat sekolah, menunjang perpustakaan desa dan membagikan paket-paket sembilan bahan pokok di sejumlah kawasan; Jabodetabek, Aceh, Kep. Riau, Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, kawasan lumpur Lapindo-Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT. Layanan kesehatan ini ditujukan bagi warga yang kurang mampu di wilayah Tegal, Jawa Tengah. Sementara itu, penanganan gizi buruk dilakukan di Belu, NTT dan Maluku Tenggara.³¹

Perhimpunan INTI menyadari sepenuhnya bahwa pola pikir yang terbuka, komprehensif, tanggap akan perubahan dengan latar belakang pengetahuan yang cukup, adalah kunci penting bagi akselerasi kemajuan bangsa ini. Semua hal tersebut dapat dicapai dengan pendidikan yang berkualitas dan bisa diakses semua warga bangsa. Sejumlah MoU dengan universitas ditandatangani dalam upaya pengembangan pendidikan; Universitas Sumatera Utara, UMY, UGM, Universitas Hasanuddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beberapa kegiatan pendidikan yang dilakukan adalah; penerbitan buku-buku, lomba menulis puisi dan cerpen, donasi pendidikan; UKM Universitas Hasanudin, Fakultas Sastra UI, SMU Setia Bhakti, Tangerang dan Universitas Al Azhar, Jakarta, seminar-diskusi dan bedah buku, mendirikan program beasiswa INTI-Pelangi untuk mengatasi tingginya angka putus sekolah di kalangan remaja, kegiatan lapangan bersama dengan sejumlah Universitas. INTI juga memberikan kontribusi bantuan dan program rehabilitasi perbaikan gedung sekolah dan perpustakaan; SMU Setia Bhakti, Tangerang, Fakultas Sastra UI, Warung Baca Lebak Wangi-Bogor, Pusat Pemberdayaan anak dan perempuan. Tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan bahasa Mandarin untuk kepentingan studi, karier, hubungan Internasional dan bisnis merupakan perkembangan yang positif bagi kemajuan Indonesia. Upaya yang dilakukan INTI adalah mengajukan usulan standarisasi metode pengajaran Bahasa Mandarin kepada delegasi pengajar Bahasa Mandarin dari Beijing.

³⁰ Ibid, hlm 135

³¹ Ibid, hlm 148

Tak hanya pendidikan dalam lingkup sekolah, INTI juga konsisten mengadakan seminar, diskusi dan bedah buku sebagai wahana pembelajaran politik bagi khalayak ramai dengan menghadirkan pembicara yang kompeten, terbuka bagi anggota ataupun non anggota tanpa pungutan biaya, diakses dan dipublikasikan melalui media massa dimana harapannya melalui kegiatan ini dapat membuka cakrawala pemahaman sebanyak-banyaknya terhadap peta kondisi bangsa ini dan posisi masyarakat Tionghoa sebagai integral yang tidak bisa dipisahkan. Beberapa topik yang pernah menjadi tema dalam kegiatan tersebut antara lain; partisipasi sosial politik Etnis Tionghoa dalam Pembangunan Indonesia Baru, Sidang Istimewa MPR dan agenda menyelamatkan bangsa, Integrasi Etnis Tionghoa ke dalam mainstream Masyarakat Indonesia, Antisipasi menghadapi krisis pangan dunia dan kontestasi politik, *Financial Tsunami; Global Changes vs Our Choices-The American Crisis and It's Impact* dan lainnya.³²

Dengan berlatar-belakangkan ungkapan bahwa melintasi batas identitas sosial, seni dan olahraga sebagai ekspresi cipta, rasa dan karsa budaya merupakan sarana efektif untuk merajut persahabatan dan persaudaraan, INTI juga melakukan kegiatan seni dan olahraga yang memungkinkan dapat mengenal lebih dekat budaya, karakter dan nilai-nilai yang dianut sekelompok masyarakat. Kegiatan yang pernah dilakukan; Pekan Budaya Peranakan Tionghoa bekerjasama dengan Mitra Museum Indonesia (2000) dan Pekan Budaya dan Pameran Persatuan Nasional bekerjasama dengan Sekretariat Negara (2000). Pada tahun 2007, INTI bekerjasama dengan Perhimpunan Pengusaha Indonesia Tionghoa mengadakan pementasan seni "Indonesia Nigt" di Beijing dan Jinan, RRT yang mendapat dukungan dari pemerintah RI, KBRI Beijing, Pemerintah RRT dan Pemerintah Daerah Provinsi Shandong. INTI juga mengirimkan kelompok tari tradisional Sumatera Utara dalam China ASEAN EXPO (CAEXPO) ke-4, Nanjing, China tahun 2007 untuk mendukung pariwisata Indonesia dan membantu terlaksananya penandatanganan kesepakatan kerjasama antara dinas Pariwisata Guangdong dengan Departemen Kebudayaan dan pariwisata RI.³³

Bidang kegiatan yang juga disasar oleh INTI adalah peningkatan peranan perempuan mengingat pentingnya peran perempuan dalam memperkuat keluarga dan berkarya di tengah masyarakat. Melalui Perempuan INTI (PINTI), kaum perempuan aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan; seni budaya, kesehatan, sosial kemanusiaan, hukum, HAM dan lainnya. Pada tahun 2008, PINTI bekerjasama dengan Komnas Perempuan menggelar peringatan hari Ibu dan HAM yang dimeriahkan dengan pagelaran seni. PINTI rutin melakukan forum, seminar dan talkshow dengan berbagai macam tema; pengetahuan dan status wanita, peranan wanita dalam globalisasi perkembangan ekonomi dan peningkatan wawasan. Selain itu juga aktif mengadakan kegiatan sosial; panen raya petani Sagatani, Singkawang bersama dengan masyarakat Dayak dan Tionghoa, Lomba kebersihan Jawa Barat yang diikuti 700 SD di 30 Kecamatan di Jawa Barat, menggelar donor darah untuk Palestina dan pasar murah (2009) serta menyalurkan bantuan untuk misi kemanusiaan penanggulangan busung lapar dan malnutrisi di NTT dan Pulau Kei Besar (2008-2009)

PENUTUP

Nasionalisme sebagai sebuah konsep, digambarkan oleh Benedict Anderson sebagai sesuatu hal yang bersifat imajiner. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat membakar jiwa seseorang untuk mengorbankan apa yang dimilikinya, termasuk nyawa sekalipun. Keimajinerannya pun menjadikan seseorang awam tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya sebagai sebuah bentuk tindakan yang disebut nasionalisme. Untuk

³² Ibid, hlm 162

³³ Ibid, hlm. 173

mengindikasikan seara sederhana apakah tindakan seseorang tersebut disebut sebagai nasionalis atautkah tidak dapat kita ketahui dari simbol-simbol yang digunakannya.

Gempuran modernisasi dan globalisasi yang melanda dunia, sedikit demi sedikit telah menggeser derajat nasionalisme yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang mampu menghubungkan seluruh penduduk dunia dengan tanpa mengenal batas-batas negarayang dimilikinya. Tentunya gempuran itu melanda tidak memandang penduduk asli ataupun imigran di suatu negara. Hal ini mengindikasikan bahwa makna nasionalisme harus dimaknai secara lebih luas.

Bagi etnik Tionghoa yang ada di Indonesia, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Mengingat rasa chauvinistik yang tinggi terhadap leluhurnya yang dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan masyarakat pribumi. Kesadaran diantara kedua belah pihak harus berjalan seiring sejaan, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan. Dalam bentuk saling menghargai keberadaan dan menjalin kerjasama diantara kedua belah pihak, termasuk aktivitas yang disebut sebagai tindakan nasionalis.

Tindakan nasionalis Etnik Tionghoa, salah satunya anggota Perhimpunan INTI dapat dilihat dari berbagai macam program dan kegiatan yang dilakukannya. Mulai dari kegiatan ekonomi, hukum dan politik, seni dan budaya, pemuda dan olahraga ataupun upaya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan di Indonesia. Pada awalnya memang berbagai aktivitas tersebut terjadi pada lingkup sempit, untuk kalangan masyarakat Tionghoa sendiri. Akan tetapi pada ranah yang lebih luas, aktivitas tersebut meluas untuk kepentingan masyarakat Indonesia lain yang membutuhkan. Mulai dari kerjasama dengan pemerintah China tentunya berdampak bagi relasi antara kedua negara sampai dengan pemberian bantuan sembako bagi masyarakat yang kekurangan pangan (malnutrisi) di Indonesia.

Hal tersebut tentunya perlu memberikan kita pembelajaran bahwa sekecil apapun perilaku seseorang yang membawa kemajuan kepada bangsa ini tentunya harus kita hargai sebagai perilaku nasionalis tanpa memandang apakah pribumi atautkah imigran, etnik Tionghoa salah satunya.

DAFTAR PUSTAKA

- 2009, Buku Kenangan; Satu Dasawarsa Perhimpunan Indonesia-Tionghoa; Menghayati Kebhinekaan, Memperkokoh Persatuan, 1999-2009, Jakarta, Perhimpunan INTI
- 2008, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan INTI, Jakarta, Perhimpunan INTI
- Anthony D. Smith, 2001, Nasionalisme; Teori, Ideologi dan Sejarah, Jakarta, Erlangga,
- Benedict Anderson, 1999, Komunitas-Komunitas Imajiner; Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme, Yogyakarta, Pustaka Pelajar dan Insist Press
- David Miller, 1997, On Nationality, Great Britain, Oxford University Press
- G.Wiliam Skinner, 1984, The Chinese Minority dalam Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, Jakarta, Graffiti
- Gondomono, 1996, Membanting Tulang Menyembah Arwah; Kehidupan Kekotaan Masyarakat Cina, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Gungwiu Wang, 1959, A Short History of The Nanyang Chinese, Singapore, Eastern University
- Hari Poerwanto, 2005, Orang Cina Khek dari Singkawang, Jakarta, Komunitas Bambu
- Herdi Sahrasad, 2007, Struktur Kolonial, Etnis Tionghoa dan Kerusuhan Rasial, Jakarta, Jurnal Universitas Paramadina Vol.5, No.2, Juli 2007
- Larry Diamond, 1998, Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi, Bandung, ITB

- Munir Mulkhan, 1996, Dialog Interaktif Nasionalisme, Agama dan Modernitas dalam Ariel Heryanto, Nasionalisme, Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Nasikun, 1996, Pembangunan dan Dinamika Integrasi Nasional dalam Masyarakat Majemuk dalam Ariel Heryanto, Nasionalisme; Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ross Poole, 1999, *Nation and Identity*, London and New York, Routledge
- Sartono Kartodirjo, 1999, "Nasionalisme, Lampau dan Kini" makalah dalam seminar tentang nasionalisme Nasionalisme Indonesia menjelang abad XXI yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma di Universitas Kristen Satya Wacana, 2-5 Juni 1993, Salatiga, 1993:4 dalam Dr. H. Roeslan Abdulgani, Problem Nasionalisme, Regionalisme dan Keamanan di Asia Tenggara, Salatiga, Universitas Duta Wacana
- Skinner, G. William, 1950, Report on The Chinese in Southeast Asia, New York, South East Asia Program Department of Far Eastern Studies
- Victor Purcell, 1994, The Chinese in Southeast Asia, London; Oxford University Press
- Wang, Gung Wa, 1959, A Short History of The Nanyang Chinese, Singapore, Eastern University
- W.F. Wertheim, 1994, *Indonesia Society in Transition*, Bandung; Sumur Bandung, 1956 dalam Amri Marzali, Kesenjangan Sosial Ekonomi antar golongan Etnik; kasus China-Pribumi di Indonesia, Majalah PRISMA, no.12 tahun 1994